

KSAD Pimpin Proses Pemakaman Doni Monardo di TMP Kalibata

JAKARTA (IM) - Sejumlah pejabat negara hadir pemakaman mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lentnan TNI (Purn) Doni Monardo, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/12).

Pantauan di lokasi, pejabat yang hadir di antaranya terpantau Mantan Panglima TNI Laksamana TNI (purn) Yudo Margono beserta sang istri AKBP Veronica Yulis Prihayati. Kemudian, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Arif Rahman dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian pun tiba di TMPNU Kalibata.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin langsung proses pemakaman jenazah almarhum Doni Monardo di TMP Kalibata.

Jenazah tiba di TMP Kalibata sekitar pukul 11.00 WIB. Para petugas upacara dari personel TNI berbaris dilengkapi dengan tim drum band. Kemudian setelah tiba hadapan liang lahat, dilakukan

upacara penghormatan terakhir.

Tembakan salvo juga mengiringi proses peristirahatan terakhir Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tahun 2014-2015.

Sementara, para hadirin baik dari pihak keluarga, kerabat dan satuan TNI AD hingga masyarakat umum tampak khidmat mengikuti upacara pemakaman jenazah almarhum Doni Monardo.

Sebagai informasi, Doni Monardo meninggal dunia Minggu (3/12) sore pukul 17.35 WIB di RS Siloam Semanggi karena sakit yang dideritanya.

“Telah meninggal dunia Letjen Purn DR HC Doni Monardo, (Kelahiran 10 Mei 1963) pada hari Ahad 3 Desember 2023 pukul 17.35 WIB. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT,” tulis Staf Khusus BNPB 2019-2021 saat Doni Monardo menjabat Kepala BNPB, Egy Massadiah, lewat pesan singkat, Minggu (3/12).

● han

Banjir di Humbang Hasundutan, Satu Tewas dan 11 Orang Hilang

JAKARTA (IM) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 200 orang meninggal akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Akibat peristiwa itu dilaporkan 11 orang dinyatakan hilang dan seorang warga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

“Sebanyak 11 orang masih dinyatakan hilang dan seorang warga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia atas petaka yang terjadi akibat dipicu oleh curah hujan tinggi ditambah faktor lainnya. Sementara itu, banjir bandang juga memaksa kurang lebih 200 jiwa mengungsi,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Senin (4/12).

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto berangkat pada Senin (4/12) pagi, untuk memantau kondisi Kabupaten Humbang Hasundutan setelah dihantam banjir bandang. Sesuai agenda, Kepala BNPB dijadwalkan memimpin rapat koordinasi

percepatan penanganan darurat bencana dilanjutkan meninjau lokasi dampak banjir bandang.

Rapat koordinasi dihadiri jajaran pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, mulai dari Bupati, Danrem, Dandim, Kapolres, Pj. Sekda Kab, Kadinsos Provinsi Sumatera Utara, Kepala Pelaksana BPBD dan SKPD terkait.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB akan memberikan beberapa butir arahan terkait upaya penanganan darurat dan lebih berfokus pada penyelamatan, operasi pencarian serta pertolongan.

Pada kunjungan kerja tersebut, Suharyanto akan menyerahkan dukungan berupa Dana Siap Pakai (DSP) maupun logistik dan peralatan yang meliputi tenda pengungsi, tenda keluarga, sembako, selimut, matras, velbed, lampu penerangan, genset listrik, mesin pompa air beserta selangnya, guna mendukung percepatan penanganan banjir bandang. ● mei

Kebocoran Data Pemilih Disebut Tidak Berasal dari Bawaslu

BANDUNG (IM) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan, kebocoran data pemilih di situs web Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ada kaitannya dengan badan pengawas.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suheny mengatakan, pihaknya hanya memiliki data pemilih dengan kategori biasa. Data tersebut memang sudah terbuka ke publik, antara lain nama pemilih, alamat rumah, RT/RW, hingga usia pemilih.

“Jadi kalau, kan ini ada anggapan orang, bisa jadi kebocorannya juga dari Bawaslu, terbangun framing begitu. Kami perlu tegaskan, enggak. Karena di Bawaslu data yang kami miliki sangat terbatas. Tidak semua elemen data kami punya,” kata Lolly di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Senin (4/12).

Sedangkan data krusial lainnya seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun nomor Kartu Keluarga (KK) pemilih tidak tersimpan di Bawaslu.

“Bawaslu (memiliki data) hanya pada 8 elemen dan itu pun sifatnya informasi yang sudah terbuka ke publik. Artinya memang informasi yang ditempel waktu proses orang mengecek ada namanya, dan itu pun sifatnya informasi yang sudah terbuka ke publik. Artinya memang informasi yang ditempel waktu proses orang mengecek ada namanya,” ucap Lolly.

Lolly menyatakan data yang diberikan oleh KPU kepada Bawaslu pun melalui mekanisme yang sangat ketat. Setelah data tersebut sampai, Bawaslu tidak lagi mengirim data ke sembarang pihak demi mencegah kebocoran data.

“Kami tidak turunkan ke bawah, karena potensi untuk bocornya kan tinggi. (Tapi) kami membutuhkan akurasi untuk memastikan akurat atau tidak datanya,” ucap Lolly.

Sebelumnya diberitakan, seorang peretas dengan nama anonim “Jimbo” mengklaim telah meretas situs KPU.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. “Jimbo” mengaku telah membagikan 500.000 data contoh yang berhasil ia peroleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual beli hasil peretasan.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari situs <https://cekdpnline.kpu.go.id/> untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Dalam unggahan itu, “Jimbo” juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih. Di dalam data yang “bocor” itu, “Jimbo” mendapatkan data pribadi, seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta TPS.

Data-data itu dijual dengan harga 74.000 dolar Amerika atau sekitar Rp 1,1 miliar. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



OPERASI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN BENIH BENING LOBSTER

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Nurawaluddin (tengah) memimpin apel kesiapan operasi pengawasan dan penindakan benih bening lobster (BBL) di Terminal 2, Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Senin (4/12). Apel dilaksanakan dalam rangka menguatkan kembali kerja sama antar Kementerian/Lembaga dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penyelundupan dan aktivitas ilegal yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya benih bening lobster.

Sultan: Kalau Dianggap Dinasti, Ya Diubah Dulu UUD 1945

Undang-undang keistimewaan Yogyakarta mengamanatkan yang menjabat gubernur adalah Sultan dan wagub Paku Alam. Apakah ini dynasty?

DIY (IM) - Gubernur DIY Sri Sultan HB X menanggapi santai pernyataan politisi PSI Ade Armando, yang menyebut politik dinasti sesungguhnya itu ada di Indonesia. Namun menurutnya Sri Sultan, DIY hanya melaksanakan Undang-Undang.

“Jadi gini ya komentar boleh wong komentar kok ndak boleh, kalau mau komentar ya komentar saja,” kata dia, Senin (4/12).

Hanya menurut Sultan, konstitusi peralihan itu diatur dalam UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1): Negara

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Di mana dalam pasal 18 B tersebut menyangkut masalah pemerintah Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY. Sehingga bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan yang menjabat gubernur adalah Sultan dan wagub Paku Alam.

“Ya melaksanakan itu aja ya kan dinasti atau tidak terserah dari sisi mana mau melihatnya. Yang penting bagi masyarakat

DIY, DIY itu daerah istimewa diakui keistimewaannya. Dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu dan sesuai dengan bunyi undang-undangnya itu,” ucapnya.

Sultan menegaskan tidak ada kalimat dinasti dalam undang-undang. Baginya yang penting DIY adalah bagian dari republik yang melaksanakan keputusan UU yang ada.

“Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti. UUD-nya,” tambahnya.

Terkait dengan aksi yang bakal dilaksanakan oleh sejumlah kelompok masyarakat, Sultan mempersilakan hal tersebut. Namun Sultan menandakan jika pihaknya tidak pernah menyuruh masyarakat untuk melakukannya.

Massa Kepung PSI Paguyuban Masyarakat

Gibran Janjikan Dana Abadi Pesantren, Santri Tak Cukup Hanya Pintar Mengaji

JAKARTA (IM) - Bakal calon wakil presiden (capres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Ashiddiqiyah 2 di Kota Tangerang, Banten, Senin (4/12). Di hadapan para santri, Gibran menyinggung soal dana abadi pesantren.

Wali Kota Surakarta itu menyatakan, dirinya dan Prabowo ingin memajukan santri lewat program dana abadi pesantren.

“Kita ingin penekanan di situ, santri itu bisa menjawab tantangan zaman, bisa memenuhi kebutuhan industri. Jadi nanti ke depan ada dana abadi pesantren,” kata Gibran, dikutip pada Senin (4/12).

Memang, kata Gibran, tak jarang kalangan santri dilupakan. Padahal, memasuki era revolusi industri 5.0, para santri juga harus mengikuti perkembangan zaman. Melalui program dana abadi pesantren yang ia tawarkan, Gibran ingin para santri tidak

hanya ahli dalam ilmu agama, tetapi juga berbagai ilmu pengetahuan lainnya.

“Kita ingin santri itu bisa menjawab tantangan zaman. Kalau santri kan pasti pintar mengaji, tapi kita juga ingin santri itu, misalnya, mengerti perbankan syariah, mengerti ekonomi syariah, mengerti bagaimana dakwah dengan menggunakan media sosial,” ucap Gibran.

“Atau mungkin santri yang mengerti pertanian, mengerti perikanan, menggunakan AI (artificial intelligence atau kecerdasan buatan), machine learning, atau santri yang punya jiwa entrepreneurship,” kata Gibran menambahkan.

Gibran berpesan kepada para santri untuk meningkatkan kemampuan diri. Ia ingin para santri berlomba-lomba menjadi yang terdepan.

“Santri selain pintar mengaji, harus punya ilmu-ilmu yang lain. Itu nanti akan menjawab semua keraguan-keraguan dan bagaimana jangan

sampai santri itu dipandang sebelah mata, tapi kita juga harus meng-upgrade diri,” katanya.

Memajukan para santri ini sejalan dengan agendanya bersama calon presiden (capres) Prabowo Subianto, untuk mewujudkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045.

“Jadi 2045 itu yang mengisri bukan saya lagi, tapi adik-adik yang lebih muda ini. Jadi menuju Indonesia emas, generasi emas, sudah disiapkan semua,” tutur putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Sebagaimana diketahui, Prabowo-Gibran merupakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). ● han

Anies Baswedan Janji akan Menghapus Perbedaan Sekolah Swasta dan Negeri

JAKARTA (IM) - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, janji akan menghapus perbedaan sekolah swasta dan sekolah negeri, khususnya dari sisi kebijakan pemerintah. Penghapusan perbedaan ini sebagai gagasan Indonesia yang lebih adil.

“Kami ingin tidak ada lagi perbedaan, apalagi kalau di pendidikan tidak lagi ada perbedaan-bedaan antara sekolah negeri dan swasta jangan dibedakan,” ujar Anies saat kampanye Pondok Pesantren Modern Nurussalam Karawang, Jawa Barat, Senin (4/12).

Perbedaan dari sisi fasilitas dan kebijakan pemerintah tak boleh mendiskriminasi sekolah swasta. Sebab, menurut Anies, anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta juga anak bangsa Indonesia.

“Negeri ini mau membangun semua bukan hanya anak yang di sekolah milik pemerintah, itu lah sebabnya mengapa gagasan kita bawa namanya keadilan,” katanya.

“Supaya adil, supaya setara, kalau setara adil insya Allah semua dapat kesem-

patan yang sama untuk masa depan lebih baik,” kata Anies.

Dalam kesempatan itu, Anies juga menyinggung isu ketahanan pangan dengan kebijakan kontrak pertanian. Warga Karawang yang mayoritas petani, kata Anies, akan lebih senang dengan kontrak pertanian karena mampu memberikan kepastian pembelian hasil panen.

“Waktu kami bekerja di Jakarta kami lakukan contract farming (kontrak pertanian) dengan ratusan petani di Indonesia,” ucapnya.

“Apa yang terjadi? Jakarta langsung membeli dari petani, petani punya kontrak sama kita 5 tahun, jadi dia (petani) tenang,” katanya.

Terakhir, Anies meminta dukungan kepada para pengajar di pesantren tersebut untuk memberikan dukungan kepada Paslon capres-cawapres nomor urut 1.

“Mohon doanya agar kami bisa menjalankan amanat ini dengan baik,” ujar Anies. ● mei

PENGUMUMAN PT DASAUTAMA TRIDAYA

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pergantian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dasautama Tridaya tertanggal 27 November 2023 yang dinyatakan dalam akta tertanggal 30 November 2023 No. 1748, yang dibuat dihadapan Vanda Pitakoka, SH, Notaris di Kabupaten Bekasi, telah diputuskan dan disetujui:

- Pembubaran dan likuidasi Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024.
- Penunjukan PT Bandar Harapan Prima, berkedudukan dan beralamat kantor di Menara MTH, Lantai 7, Sule 703, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 23, Kota Adm. Jakarta Selatan, sebagai Likuidator Perseroan.

Bagi para pihak yang berkepentingan atau memiliki tanggapan dapat menghubungi Likuidator Perseroan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengumuman ini.

Demikian Pengumuman ini disampaikan oleh Likuidator Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan 149 UU Perseroan Terbatas.

Kota Adm. Jakarta Selatan, 5 Desember 2023
Likuidator Perseroan